



DISESUAIKAN DTSEN, 21.000 PESERTA JKN NONAKTIF

Aktifkan Ulang, Pemkot Jamin Akses Kesehatan Tak Terganggu

YOGYA (KR) - Dalam waktu sepekan ini masyarakat terutama peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) dikagetkan dengan status yang menjadi tidak aktif. Pemkot Yogya pun menjamin akses kesehatan tidak akan terganggu seiring diberikannya layanan pengaktifan ulang.

Merujuk data pemerintah, terdapat 112.287 penduduk Kota Yogya yang terdaftar dalam JKN atau PBI melalui APBN. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 21.000 peserta yang statusnya menjadi tidak aktif. Hal itu seiring penyesuaian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh pemerintah pusat. "Kami baru mendapatkan informasi itu pada 1 Februari. Banyak masyarakat yang baru tahu ketika periksa ke rumah sakit karena tiba-tiba JKN nya tidak aktif. Sehingga esoknya layanan Jamkesda di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya membludak," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya drg Emma Rahmi Aryani MM, Jumat (6/2).

Dalam sehari rata-rata 350 hingga 400 warga yang mendatangi layanan Jamkesda di MPP Kota Yogya. Jumlah itu belum termasuk aduan yang disampaikan

melalui kanal WA Jamkesda. Kondisi tersebut praktis membuat petugas teknis Jamkesda kewalahan. Terutama dalam memberikan pelayanan pengaktifan ulang kepesertaannya dalam BPJS Kesehatan. Kendati otoritas yang mengaktifkan kepesertaan ialah BPJS Kesehatan, namun Pemkot Yogya tetap memberikan pelayanan. Terutama dengan mengalihkan peserta JKN menjadi Penduduk yang Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD).

Emma menambahkan, seluruh warga Kota Yogya tanpa memandang status ekonomi bisa didaftarkan melalui program PDPD atau BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh APBD Kota Yogya. Terutama, sepanjang yang bersangkutan bersedia didaftarkan di kelas 3. "Baik mereka yang mampu atau tidak mampu, bisa mengakses PDPD asalkan mau di kelas tiga. Kemudian yang bersangkutan statusnya

bukan pekerja, karena pekerja menjadi tanggungan pemberi upah," tandasnya.

Oleh karena itu, Emma berharap peserta JKN yang statusnya menjadi nonaktif seiring penyesuaian DTSEN, tidak perlu khawatir. Aktivasi ulang kepesertaan dalam BPJS Kesehatan langsung diberikan. Hanya, keterbatasan petugas di layanan Jamkesda juga harus dimaklumi. Sehingga sejak kemarin kuota aktivasi ulang secara langsung di layanan Jamkesda kompleks MPP Kota Yogya dibatasi hingga 250 orang per hari. Di luar itu, kanal online justru tetap dibuka lebar, termasuk di luar jam kerja. Yakni melalui WA Jamkesda dan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) dalam menu pendaftaran.

Syarat aktivasi ulang cukup menyerahkan KTP dan kartu keluarga. Data tersebut oleh petugas Jamkesda selanjutnya diteruskan ke BPJS Kesehatan



KR-Ardhi Wahidan
Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya (tengah) menyampaikan penjelasan kepada awak media.

melalui akun yang diberikan. Pihak BPJS Kesehatan pun telah berkomitmen untuk mengaktifkannya dalam kurun satu jam kemudian, tidak lagi harus menunggu dua pekan. "Sebelumnya kami hanya diberikan dua akun. Alhamdulillah karena Kota Yogya sudah UHC akhirnya ditambah lima akun karena kondisi saat ini. Sehingga ada tujuh akun yang kami gunakan guna melayani aktivasi ulang tersebut," urai Emma.

Di samping itu, aktivasi ulang juga diprioritaskan bagi pasien darurat. Seperti kemoterapi yang sudah terjadwal rutin. Pasien tersebut selain menyerahkan KTP dan KK juga melampirkan

surat rujukan. Sehingga akses layanan kesehatan bisa berjalan seperti biasa.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogya Waryono, menambahkan Walikota Yogya Hasto Wardoyo sudah menginstruksikan agar pelayanan kepada masyarakat terkait aktivasi ulang mendapat atensi. Sehingga akses warga membludak, pihaknya langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan mendapat tambahan akun aktivasi kepesertaan. Hanya, bagi warga yang dalam KK masih berstatus sebagai karyawan swasta dan hendak diaktifkan sebagai PDPD, maka status tersebut harus digantij lebih dahulu.

Pasalnya status pekerja akan tertolak dalam aplikasi atau sistem di BPJS Kesehatan, untuk menjadi peserta PDPD. Begitu pula warga yang mengajukan melalui JSS, perlu dipastikan nama dalam KK yang hendak diaktifkan guna mempercepat proses administrasi. "Kalau data sudah sesuai, bisa diok secara berkala melalui JKN Mobile atau aplikasi Pandawa milik BPJS Kesehatan. Kami tidak bisa mengakses status yang kecuali memang yang bersangkutan," katanya.

Terkait kemampuan APBD dalam menjangkau warga melalui program PDPD, tidak perlu dikhawatirkan. Walikota, sudah berkomitmen, alokasi sekitar Rp 44 miliar dalam APBD 2026 bisa diperbarui sesuai kebutuhan melalui perubahan anggaran. Apalagi dalam perjalanan waktu, peserta PDPD juga fluktuatif. Bahkan, bagi yang memenuhi kriteria untuk dibiayai APBN, bisa disulunkan ke Kementerian Sosial oleh dinas terkait untuk masuk dalam PBI atau JKN.

Waryono menambahkan hingga saat ini terdapat sekitar 1.300 warga yang sta-

tus kepesertaan BPJS Kesehatan dapat diaktifkan kembali. Jumlah itu merupakan akumulasi layanan sejak Senin (2/2) lalu. "Layanan ini membutuhkan lintas OPD. Tidak hanya Dinas Kesehatan saja tetapi juga Dinas Kesehatan, Dinkes, Dinas Kesehatan, Diskominfosan. Kami pun berkomitmen agar semua pengajuan bisa terlayani secepatnya. Masyarakat tidak perlu khawatir," imbaunya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Nurcahyo Nugroho, mengaku jajarannya juga memastikan akses terhadap layanan dasar masyarakat tidak akan terganggu dengan penonaktifan kepesertaan ribuan JKN atau PBI APBN oleh pemerintah pusat. Dirinya bahkan mengapresiasi gerak cepat Dinas Kesehatan dalam memberikan mitigasi kejadian tersebut. "Warga yang memiliki penyakit kronis memang harus diprioritaskan. Harapan saya petugas teknis di Jamkesda juga bisa terus ditambah agar mempercepat aktivasi warga yang kepesertaannya dalam PBI dicoret oleh pusat," terangnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005